



P.T. BPR ADJI CAKA

JL. LAKS. MALAHAYATI NO. 1G - H TELP. : (0721) 484828 HUNTING (4LINES),
FAX. (0721) 488228 PO.BOX 1048/TK BANDAR LAMPUNG
Email : bpradjicaka@bank-adjicaka.co.id Website : <https://bank-adjicaka.co.id/>

KATA PENGANTAR

Yth.

- PEMEGANG SAHAM PT. BPR ADJI CAKA
- OTORITAS JASA KEUANGAN
- DPP PERBARINDO
- MAJALAH MEDIA BPR

Dengan hormat,

Seiring dengan meluasnya pelayanan dan peningkatan volume usaha PT. BPR Adji Caka (BPR), maka semakin meningkat risiko BPR, sehingga mendorong kebutuhan terhadap penerapan tata kelola oleh Bank Perkreditan Rakyat.

Dalam rangka meningkatkan kinerja BPR, melindungi para pemangku kepentingan (*stakeholders*) yakni seluruh pihak yang memiliki kepentingan secara langsung atau tidak langsung terhadap kegiatan usaha BPR, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada Perbankan, maka berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat (berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 1 April 2015) dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat (berlaku sejak ditetapkan tanggal 10 Maret 2016), BPR secara berkelanjutan telah menerapkan tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG).

Bahwa dalam rangka pemenuhan kewajiban penyampaian Laporan Penerapan Tata Kelola, dengan ini kami sampaikan laporan dimaksud untuk periode 31 Desember 2019 sebagaimana terlampir.

Bandar lampung, 30 April 2020

Hormat kami,
PT. BPR ADJI CAKA

Cornelius Edwin Dastin Halim
Komisaris Utama

PT. BPR ADJI CAKA
BANDAR LAMPUNG

Hamrizal Razali
Direktur Utama

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
PT. BPR ADJI JAKA
PER 31 DESEMBER 2019

I. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ tertinggi dalam struktur organisasi PT. BPR Adji Caka. Selama tahun 2019 telah diselenggarakan RUPS sebagai berikut:

a. RUPS Luar Biasa tanggal 15 Februari 2019

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa telah menyetujui hal-hal berikut ini:

- 1) Menerima pengunduran diri Dian Patrianda selaku Komisaris Perseroan;
- 2) Menyetujui pengangkatan Bambang Wijonarko selaku Komisaris Perseroan untuk masa jabatan selama 5 tahun mendatang, maka terdapat susunan Dewan Komisaris sebagai berikut:
 - Komisaris Utama : Cornelius Edwin Dastin H.
 - Komisaris : Bambang Wijonarko.

b. RUPS Luar Biasa tanggal 05 April 2019

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa telah menyetujui hal-hal berikut ini:

- 1) Menyetujui untuk memperpanjang dan mengangkat kembali Komisaris Utama yaitu Cornelius Edwin Dastin Halim untuk masa jabatan selama 5 tahun mendatang. Sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT BPR Adji Caka tahun 2019 yaitu:
 - Direktur Utama : Hamrizal Razali
 - Direksi : Santie

- Komisaris Utama: Cornelius Edwin Dastin Halim
- Komisaris : Bambang Wijonarko

c. RUPS Luar Biasa tanggal 22 April 2019

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa telah menyetujui hal-hal berikut ini:

- 1) Menyetujui laba tahun 2018 dimasukkan ke laba ditahan tahun 2018; dan
- 2) Menyetujui untuk melakukan pembagian Insentif dari Laba Tahun 2018 yang sudah dicadangkan dengan data pembagian yang telah disetujui oleh pemegang saham.

d. RUPS Luar Biasa tanggal 12 Mei 2019

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa telah menyetujui hal-hal berikut ini:

- 1) Menyetujui pembagian bonus dari Laba tahun 2019 sebesar 10% untuk pencapaian Laba di bawah Rp 1.750.000.000 dan sebesar 12,5% untuk pencapaian Laba di atas Rp 1.750.000.000.

e. RUPS Luar Biasa tanggal 09 Desember 2019

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa telah menyetujui hal-hal berikut ini:

- 1) Menyetujui dan menerima dengan baik rekomendasi Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Drs Henry & Sugeng dalam rangka pemeriksaan laporan keuangan BPR tahun buku yang berakhir tanggal 31 Des 2019.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

a. Jumlah dan Komposisi Anggota Direksi

Sesuai dengan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 15 Februari 2019 dengan putusan perubahan anggota Direksi. Sehingga susunan pengurus

BPR dan telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan adalah sebagai berikut:

- 1) Direktur Utama : Hamrizal Razali
- 2) Direktur : Santie

b. Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

Direksi telah berupaya penuh melaksanakan rekomendasi Dewan Komisaris, antara lain melalui upaya pemenuhan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan OJK, penerapan ketentuan OJK dengan baik, perbaikan pengelolaan system penagihan, perbaikan kompetensi sumber daya manusia BPR dan menjaga tingkat likuiditas yang sehat.

3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

a. Jumlah dan Komposisi Anggota Dewan Komisaris

Sesuai dengan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 15 Februari 2019 dengan putusan dengan putusan menyetujui pengangkatan Bambang Wijonarko selaku anggota Dewan Komisaris BPR dan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 05 April 2019 dengan putusan menyetujui untuk memperpanjang dan mengangkat kembali Komisaris Utama yaitu Cornelius Edwin Dastin Halim, maka susunan Dewan Komisaris per 31 Desember 2019 mengalami perubahan sebagai berikut:

- 1) Komisaris Utama : Cornelius Edwin Dastin Halim
- 2) Komisaris : Bambang Wijonarko

b. Rekomendasi Dewan Komisaris:

Selama tahun 2019, Komisaris telah memberikan rekomendasi kepada Direksi, yang umumnya disampaikan pada saat pelaksanaan Rapat antara Dewan Komisaris dan Direksi, antara lain:

- 1) Memastikan setiap debitur dimaintenance per bulannya serta dibuatkan laporan per minggu untuk setiap debitur yang terlambat.
- 2) Pelepasan kredit yang dilakukan oleh BPR wajib mengikuti aturan dan prinsip kehati-hatian.
- 3) Membuat rencana atau program untuk peningkatan kompetensi sumber daya manusia BPR dalam rangka meningkatkan prestasi dan kinerja BPR ke depannya.
- 4) Meningkatkan NOA karena dari sisi out standing kredit yang diberikan meningkat, tetapi dari sisi jumlah debitur atau NOA mengalami penurunan.

4. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite

Dikarenakan modal inti BPR belum mencapai Rp 50.000.000.000,- , maka Direksi memutuskan untuk belum perlu membentuk Komite Manajemen Risiko, termasuk komite lainnya. Dengan demikian, informasi mengenai Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite, serta Program Kerja Komite dan Realisasinya tidak disajikan dalam laporan ini.

II. Kepemilikan Saham Anggota Direksi Serta Hubungan Keuangan Dan/Atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi Lain Dan/atau Pemegang Saham

Komposisi anggota Direksi PT. BPR Adji Caka pada periode tahun 2019 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham yang tertuang dalam Akta Notaris No. 21 tanggal 17 Januari 2018, adalah sebagai berikut:

1. Hamrizal Razali - Direktur Utama (0%);

2. Santie - Direktur (0%).

Seluruh anggota Direksi tersebut di atas tidak mempunyai kepemilikan saham pada PT. BPR Adji Caka.

Seluruh anggota Direksi PT. BPR Adji Caka tidak mempunyai hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi lain dan/atau Pemegang Saham.

III. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris Serta Hubungan Keuangan Dan/Atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Direksi, Anggota Dewan Komisaris Lain Dan/Atau Pemegang Saham

Komposisi Dewan Komisaris PT. BPR Adji Caka pada periode tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Cornelius Edwin Dastin Halim - Komisaris Utama (20%);

Komisaris Utama mempunyai kepemilikan saham pada PT. BPR Adji Caka.

Seluruh anggota Dewan Komisaris PT. BPR Adji Caka tidak mempunyai hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Anggota Direksi lain dan/atau Pemegang Saham.

IV. Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Direksi dan Dewan Komisaris

Kebijakan remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham bagi Direksi dan Dewan Komisaris PT. BPR Adji Caka adalah sebagaimana tabel di bawah ini:

Jenis Remunerasi dan Fasilitas lainnya			Jumlah Diterima dalam 1 Tahun			
			Direksi		Dewan Komisaris	
			Orang	Jutaan Rupiah	Orang	Jutaan Rupiah
1.	Remunerasi		2	588	2	186
2.	Fasilitas lainnya *)					
	a.	Yang dapat dimiliki	0	0	0	0
	b.	Yang tidak dapat dimiliki	2	48	0	0
Total			2	636	2	186

*) dinilai dalam ekuivalen Rupiah

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menerima remunerasi dalam satu tahun berdasarkan kisaran tingkat penghasilan adalah sebagaimana tabel di bawah ini:

Jumlah Remunerasi*) per orang dalam 1 tahun	Jumlah Direksi	Jumlah Dewan Komisaris
Diatas Rp 2 miliar	0	0
Diatas Rp 1 miliar s.d 2 miliar	0	0
Diatas Rp 500 juta s.d 1 miliar	0	0
Rp 500 juta ke bawah	2	2

*) yang diterima dalam bentuk keuangan (non natura)

V. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam skala perbandingan adalah sebagai berikut:

1. Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah adalah 1,87:1.
2. Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah adalah 21,4:1.
3. Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah adalah 11,3:1.
4. Rasio gaji Direksi tertinggi dan Komisaris tertinggi adalah 28,7:1.
5. Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi adalah 36,2:1.

VI. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

1. Jumlah Rapat Dewan Komisaris yang diselenggarakan selama tahun 2019 adalah 4 (empat) kali.
2. Tingkat kehadiran masing-masing anggota Dewan Komisaris di setiap rapat adalah sebanyak 4 (empat) kali dihadiri lengkap oleh kedua anggota Dewan Komisaris.
3. Topik atau materi rapat sebagai berikut:
 - a. Rencana kerja Dewan Komisaris tahun 2020;
 - b. Evaluasi realisasi rencana bisnis tahun 2019;
 - c. Pembahasan debitur inti BPR.

VII. Jumlah Penyimpangan Intern (*Internal Fraud*)

Selama periode tahun 2019 tidak ada penyimpangan/kecurangan (*internal fraud*) yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, pegawai tetap, dan/atau pegawai tidak tetap (honorar dan *outsourcing*), sebagaimana tabel di bawah ini:

(satuan)

Internal Fraud	Jumlah Kasus Yang di Lakukan Oleh			
	Direksi	Dewan Komisaris	Pegawai Tetap	Pegawai Tidak Tetap

dalam 1 tahun	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan
Total Fraud	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah diselesaikan	-	-	-	-	-	-	-	-
Dalam proses penyelesaian di internal BPR	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-	-	-

VIII. Permasalahan Hukum

Permasalahan hukum, baik hukum perdata mau pun hukum pidana yang dihadapi BPR selama periode tahun laporan dan telah diajukan melalui proses hukum serta upaya penyelesaian, sebagai berikut:

(satuan)

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-
Total	-	-

IX. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan

No	Nama dan Jabatan Pihak yang	Nama dan Jabatan	Jenis	Nilai Transaksi	Keterangan *)
----	-----------------------------	------------------	-------	-----------------	---------------

	Memiliki Benturan Kepentingan	Pengambil Keputusan	Transaksi	(jutaan Rupiah)	
1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-

*) Note:

- Tidak sesuai sistem dan prosedur yang berlaku; dan
- Menjelaskan keterkaitan antara nama dan jabatan pihak yang memiliki benturan kepentingan dengan nama jabatan dan jabatan pengambil keputusan.

Selama periode tahun 2019 tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

X. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial

Pemberian dana sosial dan bantuan sosial kepada pihak-pihak tertentu dilakukan oleh PT. BPR Adji Caka selama tahun 2019 antara lain adalah:

1. Pemberian bantuan dana kepada Himatemia Unila untuk acara Excess Tahun 2019, dengan total sebesar Rp 500.000,- (Februari 2019);
2. Pemberian bantuan dana kepada Youtube Cawo Ekam untuk acara membudayakan aksara Lampung sebagai wujud kecintaan terhadap budaya Lampung, dengan total sebesar Rp 500.000,- (Juli 2019);
3. Pemberian bantuan dana kepada Koperasi Mina Dermaga untuk acara Muscab VI Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Lampung Selatan 2019, dengan total sebesar Rp 1.000.000,- (September 2019)

XI. Kesimpulan Umum *Self Assessment* Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG)

Dari hasil penilaian sendiri atas Pelaksanaan GCG BPR, ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan GCG BPR memperoleh peringkat 1,62 atau “sangat baik”. Adapun dasar pertimbangannya adalah karena Pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* secara umum telah dilaksanakan, namun masih banyak juga yang belum dilaksanakan secara optimal, sebagaimana dapat dilihat di bawah ini:

1. Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang persyaratan Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi serta Integritas, Kompetensi dan Reputasi Keuangan Dewan Komisaris maupun Direksi dapat dipenuhi oleh BPR.
2. Telah diangkat Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan BPR, yang telah mendapat persetujuan OJK, diharapkan penerapan GCG ke depan akan lebih fokus dan terarah.
3. Tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan.
4. Tidak ada permasalahan hukum secara perdata atau pidana baik dari internal maupun dari sisi eksternal seperti debitur atau nasabah BPR.
5. Adanya transparansi keuangan maupun non keuangan.
6. Bank telah melaporkan seluruh kewajiban pelaporan kepada OJK atau lembaga lain yang terkait dalam rangka Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, dan saat ini bank telah memiliki website BPR Adji Caka dengan alamat www.bank-adjicaka.co.id